



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Nomor : W10.HA.04.10- 25 TAHUN 2021

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN SIPKUMHAM
YANG MENDUKUNG PEMBUATAN KEBIJAKAN DI WILAYAH
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan Kebijakan di wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan Kebijakan di wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-013.11.2.408728/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN SIPKUMHAM YANG Mendukung PEMBUATAN KEBIJAKAN DI WILAYAH
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan Kebijakan di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana termaktub dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertugas untuk menyempurnakan analisis data dan menyusun laporan analisis Kebijakan (pelayanan publik/ permasalahan hukum/ permasalahan HAM) berkala setiap bulan berdasarkan inventarisasi dan identifikasi data permasalahan yang telah dikumpulkan secara otomatis (crawling) pada SIPKUMHAM,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Liberti Sitinjak
NIP.19640701 199103 1 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA TENTANG NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN SIPKUMHAN YANG MENDUKUNG PEMBUATAN KEBIJAKAN DI WILAYAH, TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : W10.HA.04.10- TAHUN 2021

Tanggal : 23 Februari 2021

No	TUGAS	NAMA	INSTANSI
1.	NARASUMBER	Dr. R. Lina Sinaulan, SH, MM, MH.	Dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Jayabaya



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH,

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Liberti Sitinjak
NIP.19640701 199103 1 001